

**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2011-2014**

Oleh:
Uyik Retnaning Sayekti
Politeknik Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kasus untuk menganalisis tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedangkan variabel independennya yaitu Tingkat Kemandirian, Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jenis data yang digunakan adalah data Primer dengan menggunakan data laporan keuangan Tahun 2011-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan populasi yang digunakan adalah seluruh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dari hasil yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Tingkat Kemandirian, efektifitas dan efisiensi dari tahun ketahun menunjukkan tingkat yang fluktuatif, sehingga berbeda dari tahun ketahun.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemandirian, Efektifitas dan Efisiensi

PENDAHULUAN

Instansi atau lembaga pemerintah merupakan lembaga sektor publik yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan publik. Proses pemenuhan kebutuhan publik lembaga pemerintah tentunya berharap dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dimilikinya. Pemerintahan daerah dapat dikatakan mandiri, Pertama jika daerah tidak lagi bergantung pada dana bantuan dan intervensi dari pemerintah pusat. Kedua, jika daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Tingkat kemandirian yang tinggi

serta tingkat efisiensi yang efektif akan menimbulkan tingkat efisiensi yang efisien.

Motivasi penelitian ini bahwa untuk menganalisis apakah Tingkat Kemandirian, Efektifitas dan Efisiensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk memperoleh bukti empiris yang terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana penelitian terdahulu menurut Ayu (2007) dan Yunita (2008).

Rumusan Masalah

Latar belakang yang sudah dijelaskan maka peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana menganalisis Tingkat Kemandirian, Efektifitas dan Efisiensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sampai 2014?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Tingkat Kemandirian, efektivitas dan efisiensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sampai 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan secara garis besar dibedakan menjadi empat macam yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan aliran kas. Keempat macam tersebut diringkaskan kembali menjadi dua macam diantaranya laporan neraca dan laporan laba rugi. Perubahan modal dan laporan aliran kas pada akhirnya akan diikhtisarkan dalam laporan neraca dan atau laporan laba rugi.

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2011-2014 yang merupakan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD dan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi aset dan kewajiban (neraca), anggaran dan realisasi anggaran (LRA) serta kinerja keuangan yang dicapai tiap tahun yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007) berdasarkan peraturan-peraturan manajemen keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah memiliki karakteristik antara lain :

1. Pengertian Daerah adalah propinsi dan kota atau kabupaten. Istilah Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, juga kota madya tidak lagi digunakan.
2. Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah ini adalah badan eksekutif, sedang badan legislatif di daerah adalah DPRD (pasal 14 UU No.22 Tahun 1999). Oleh karena itu, terdapat pemisahan yang nyata antara legislatif dan eksekutif.

3. Perhitungan APBD menjadi satu laporan dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah (pasal 5 PP Nomor 108 Tahun 2000). Bentuk Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas:
 - a. Laporan Perhitungan APBD
 - b. Nota Perhitungan APBD
 - c. Laporan Aliran Kas
 - d. Neraca Daerah dilengkapi dengan penilaian berdasarkan tolak ukur Renstra (pasal 38 PP Nomor 105 Tahun 2000)
4. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan yang menunjukkan hak Pemda tetapi masuk dalam pos penerimaan yang belum tentu menjadi hak Pemda.
5. Masyarakat termasuk didalam unsur-unsur penyusunan APBD disamping pemerintah daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD.
6. Indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya mencakup:
 - a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya.
 - b. Perbandingan antara standar biaya dan realisasinya.
 - c. Target dan persentase fisik proyek, tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan
7. Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD.
8. Digunakan akuntansi didalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber-sumber pendapatan/ penerimaan daerah menurut UU nomor 32 Tahun 2004 :
 - a. Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah:
 - 1) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 2) Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja.

- b. Sumber Pendapatan Daerah:
- 1) Pendapatan asli daerah, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - 2) Dana perimbangan.
 - 3) Pinjaman daerah.
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- c. Persentase Dana Perimbangan:
- 1) Dana Perimbangan :
 - a) Bagian daerah dari penerimaan Pajak dan Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - b) Dana alokasi khusus.
 - c) Dana alokasi umum
 - 2) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, diterima langsung oleh daerah penghasil.
 - 3) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dengan pembagian imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
 - 5) Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.
 - 6) 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan dan 20% penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan yang menjadi bagian dari pemerintahan pusat dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

- 7) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksterm. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapat Asli Daerah (PAD) di bandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misal, bantuan Pemerintah Pusat atau dari Pinjaman. (Halim:2004). Semakin tingginya rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin kecil, dan demikian juga sebaliknya.

$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi \& Pinjman}} \times 100\%$
--

Jika rasio kemandiriannya 0 sampai dengan 25% maka disimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah tersebut sangat rendah sekali, jika rasio kemandirian lebih dari 25 % hingga 50% dalam rasio kemandirian daerah dikatan masih rendah, jika rasio kemandirian lebih dari 50% hingga 75% masih dikatakan sedang dan jika rasio kemandirian lebih dari 75% hingga 100% sudah dikatan baik atau rasio kemandirian daerah Tinggi.

2. Rasio Efektifitas

Menurut Halim (2007), rasio efektifitas menggaambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil yang sudah ditentukan dalam rumus yang sudah tertera di atas jika rasio efektifitasnya kurang dari 100% maka efektifitasnya dikatakan sangat tidak efektif, jika rasio efektifitasnya sama dengan 100% maka rasio daerahnya dikatakan efektifitas berimbang dan jika rasio efektifitasnya lebih dari 100% maka rasio efektifitasnya sudah dikatakan efektif.

3. Rasio Efisiensi

Efisiensi untuk memperoleh ukuran rasio efektivitas daerah yang lebih baik, perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. (Halim:2007).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio perbandingan dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Pajak Daerah
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame

- e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - g. Pajak parkir
2. Retribusi Daerah
 3. Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono:2009)

Jenis Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu kualitatif berupa data tentang hasil penjelasan dari pimpinan dan staf yang memberikan informasi baik lisan maupun tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedangkan Sampel yang digunakan adalah data laporan keuangan. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel yang digunakan adalah data laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011 sampai 2014. Sampel adalah bagaian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut

Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Variabel Terikat

Variabel terikat ini adalah Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Variabel dependen atau sering disebut dengan variabel terikat sering disebut sebagai variabel konsekuen, variabel kriteria, variabel pengaruh, terikat, tergantung, dan variabel output. Variabel dependen disebut variabel terikat adalah karena setiap variabel independen akan mempengaruhi variabel terikat/ independen.

Variabel Bebas

Variabel dalam penelitian ini yaitu mencakup rasio-rasio yang dilakukan penelitian ini yaitu Tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi dijelaskan dibawah:

Analisis Tingkat Kemandirian

Kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi dan sumber-sumber yang sudah dijelaskan rumus dan kriteria pada pembahasan sebelumnya. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ektern, semakin rendah dan demikian pula sebaliknya, rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Analisis Tingkat Efektifitas

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dengan rumus dan kriteria yang sudah ditentukan. Semakin tinggi tingkat efektifitas maka semakin efektif dan sebaliknya.

Analisis Tingkat Efisiensi

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini

dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Tingkat efisiensi jika rasionya kurang dari 1 atau 100% dikatakan efisien.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Analisis Rasio Kemandirian, efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011

Berikut adalah hasil analisis tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi di Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: (**Lampiran 1**)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai presentase kemandirian sebesar 67,19%. Hasil penelitian yang dilakukann oleh peneliti ini menunjukkan bahwa hasil presentase dikatakan dalam kriteria Sedang, hal ini menyatakan bahwa tingkat Kemandirian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kemandiriannya masih sanggup membiayai pengeluaran sendiri.

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa nilai presentase Efektifitas sebesar 112,74%, hal ini menyatakan bahwa tingkat Efektifitas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikatakan dalam kriteria Efektif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dikatan efisien karena kurang dari 50%.

Analisis Rasio Kemandirian, efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012

Berikut adalah hasil analisis tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi di Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: (**Lampiran 2**)

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa nilai presentase kemandirian sebesar 60,65%.

Hasil presentase menunjukkan bahwa dikatakan dalam kriteria Sedang.

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa nilai presentase Efektifitas sebesar 119,29%, hal ini menyatakan bahwa tingkat Efektivitas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikatakan dalam kriteria Efektif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dikatan efisien karena kurang dari 50%.

Analisis Rasio Kemandirian, efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013

Berikut adalah hasil analisis tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi di Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: (**Lampiran 3**).

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa nilai presentase kemandirian sebesar 103,20%. Hasil presentase menunjukkan bahwa dikatakan dalam kriteria Tinggi, hal ini menyatakan bahwa tingkat Kemandirian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kemandiriannya baik.

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa nilai presentase Efektifitas sebesar 119,29%, hal ini menyatakan bahwa tingkat Efektivitas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikatakan dalam kriteria Efektif.

Hasil penelitian dalam prosentase diatas menunjukkan bahwa hasilnya sebesar 38,87%, jadi dapat dikatakan Efisien.

Analisis Rasio Kemandirian, efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

Berikut adalah hasil analisis tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi di Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: (**Lampiran 4**).

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa nilai presentase kemandirian sebesar 119,39%. Hasil presentase menunjukkan bahwa dikatakan dalam kriteria Tinggi, hal ini menyatakan bahwa tingkat dalam kemandiriannya baik.

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa nilai presentase Efektifitas sebesar 126,19%, hal ini menyatakan bahwa tingkat Efektifitas dikatakan dalam kriteria Sangat Efektif karena dalam presentase pada tabel diatas jika lebih dari 100% dikatakan Efektif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hasil prosentase efisiensi sebesar 23,72%. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dikatan efisien.

PEMBAHASAN

Hasil Analisis Tingkat Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tahun 2011-2014

Hasil penelitian tahun 2011 menunjukkan tingkat kemandiriannya 67,19%, tingkat kemandirian tahun 2012 sebesar 60,65%, tahun 2013 menghasilkan tingkat kemandirian sebesar 103,20% dan tingkat kemandirian pada tahun 2014 menghasilkan kemandirian sebesar 119,39%. Tingkat kemandirian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tahun 2011 dan 2012 kemandiriannya dikatakan Sedang, sedangkan Tahun 2013 dan 2014 tingkat kemandiriannya tergolong tinggi.

Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tahun 2011-2014

Hasil penelitian tahun 2011 menunjukkan tingkat efektifitas sebesar 112,74%, tingkat efektifitas tahun 2012 sebesar 119,29%, tahun 2013 menghasilkan tingkat efektifitas sebesar 142,62% dan tingkat keefktifitas pada tahun 2014 menghasilkan efektifitas sebesar 126,19%. Tingkat efektifitas atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dari

Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sudah mencukupi kriteria lebih dari 100% jadi dikatakan sangat efektif.

Tingkat Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tahun 2011-2014

Hasil penelitian tahun 2011 menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 49,33%, tingkat efisiensi tahun 2012 sebesar 51,67%, tahun 2013 menghasilkan tingkat efisien sebesar 34,87% dan tingkat efisiensi pada tahun 2014 menghasilkan kemandirian sebesar 23,72%. Tingkat efisiensi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dibawah 100% maka dikatakan efisien.

PENUTUP

Simpulan

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan bentuk deskriptif kuantitatif. Menggambarkan karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Variabel penelitian terdiri atas tiga rasio, diantaranya rasio kemandirian, efektifitas serta efisiensi.

Tingkat kemandirian atas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 menunjukkan prosentase 67,19%, tahun 2012 menunjukkan 60,65%, kemandirian tahun 2013 menghasilkan tingkat kemandirian sebesar 103,20% dan tahun 2014 kemandiriannya sebesar 119,39%. Tingkat kemandirian dapat dikatakan Sedang karena sudah memenuhi kriteria.

Tingkat keefektivitas Tahun 2011 menunjukkan prosentase sebesar 112,74%, sebesar 119,29% menunjukkan keefektivitasan tahun 2012, tahun 2013 menghasilkan prosentase sebesar 142,62% dan tahun 2014 menunjukkan prosentase sebesar 126,19%. Tingkat efektifitas tahun dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi tingkat kriteria yang sudah ditentukan.

Tingkat keefisiensi menunjukkan prosentase sebesar 49,33%, 51,67%, 34,87 dan

23,72% pada tahun 2011 sampai 2014. Keefisiensi atas Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan efisien karena semakin kecil tingkat prosentase maka semakin baik tingkat keefisiensinya.

Saran

Berdasarkan hasil analisis rasio Pemerintah Kabupaten Nganjuk beberapa kesimpulan yang telah dibuat maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan kinerja kemandirian, efektifitas serta efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus mengoptimalkan penerimaan daerah melalui peningkatan pelayanan dan peningkatan kerjasama dengan semua pihak. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggung jawab.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar memperluas ruang lingkup penelitian, dapat memperbanyak sampel yang digunakan. Peneliti selanjutnya dapat menambah rasio aktivitas atau rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Rifan. 2007. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sumatera Utara. *Skripsi*. Program Pasca Sarjana. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatra Utara.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif, Rangkuman 7 Undang-undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri*. Jakarta: Indeks.

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2011. *Laporan Keuangan Periode Tahun 2011-2014 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Nganjuk.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Upp Stim Ykpn. Yogyakarta.
- Kountur, Ronny. 2009. *Metode Penelitian*. Edisi Revisi. PPM. Jakarta
- Mahardika, I Gusti Ngurah Suryaadi dan Luh Gede Sri Artini. 2012. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan*. Fakultas Ekopnomi. Universitas Udayana.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Program Pasca Sarjana. Departemen Akuntansi. Universitas Sumatera Utara.
- Nunu, Arson Abd. Rasyid. 2011. Analisis Tingkat Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. *Skripsi*. Program Pasca Sarjana. Program Studi Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-enam.
- Republik Indonesia. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan*
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Industri Pemerintah*.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*
- Republik Indonesia. 1994. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.
- S. Munawir. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- S. Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ke Empat. Liberty. Yogyakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Tiga Belas. Alfabeta. Bandung.
- Syurmita. 2014. *Prediksi Financial Distress Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Indonesia*. *Tesis*. Universitas Al Azhar Indonesia.
- Yunita, Dewi Anggara. 2008. Pengaruh Efektifitas PAD dan DAU Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemkab/ Pemko Di Sumatera Utara. *Skripsi*. Program Pasca Sarjana. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Analisis Rasio Kemandirian, efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2011		Selisih	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27.598.764.020,26	31.115.944.826,29	3.517.180.806,03	112,74 %
2.	Pendapatan Transfer (DAK)	61.747.700.000,00	46.303.650.000,00	15.444.050.000,00	74,98 %
3.	Biaya-biaya	16.903.571.649,00	15.350.972.025,00	1.552.599.624,00	90,81%
	Jumlah/ Rata-rata	106.250.035.669,26	92.770.566.851,29	2.051.383.0430,03	278,53%

1. Analisis Rasio Kemandirian

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provisi dan Pinjamana}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Rp. 31.115.944.826,29}}{\text{Rp. 46.303.650.000,00}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian = 0,671997668 atau X = 67,19%

Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

2. Analisis Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 31.115.944.826,29}}{\text{Rp. 27.598.764.020,26}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas = 1,127439794 Atau X = 112,74%

Efektifitas Daerah	Rasio Efektifitas (%)
Tidak Efektif	$X < 100\%$
Efektifitas berimbang	$X = 100\%$
Efektif	$X > 100\%$

3. Analisis Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 15.350.972.025,00}}{\text{Rp. 31.115.944.826,29}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 0,49334745 \text{ Atau } X = 49,33\%$$

Lampiran 2: Analisis Rasio Kemandirian, efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Selisih	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29.677.993.284,7	35.404.139.345,3	5.726.146.060,6	119,29 %
2.	Pendapatan Transfer (DAK)	2	2	0	0 %
3.	Biaya-biaya	58.366.860.000,0	58.366.860.000,0	5.438.438.509,0	100,00 %
		0	0	0	0 %
	Jumlah/ Rata-rata	23.734.479.514,0	18.296.041.005,0	10.876.477.018,00	77,09 %
		0	0	0	0 %
	Jumlah/ Rata-rata	111.779.332.798,72	112.067.040.350,32	10.876.477.018,00	219,29 %

1. Analisis Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provisi dan Pinjamana}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Rp. 35.404.139.345,32,-}}{\text{Rp. 58.366.860.000,-}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = 0,606579476 \text{ atau } X = 60,65\%$$

Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

2. Analisis Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 35.404.139.345,32}}{\text{Rp. 29.677.993.284,72}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas} = 1,192942495 \text{ atau } X = 119,29\%$$

Efektifitas Daerah	Rasio Efektifitas (%)
Tidak Efektif	X < 100%
Efektifitas berimbang	X = 100%
Efektif	X > 100%

3. Analisis Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 18.296.041.005,00,-}}{\text{Rp. 35.404.139.345,32}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 0,516776889 \text{ atau } X = 51,67\%$$

Lampiran 3: Analisis Rasio Kemandirian, efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2013		Selisih	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43.004.050.277,9	61.336.381.783,5	18.332.331.505,5	142,63%
2.	Pendapatan Transfer (DAK)	0	0	0	75,00%
3.	Biaya-biaya	28.848.034.911,0	21.392.942.080,0	7.455.092.831,0	74,16%
	Jumlah/ Rata-rata	151.097.315.188,9	142.163.246.863,5	56.598.731.336,5	217,63%

1. Analisis Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provisi dan Pinjamana}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Rp. 61.336.381.783,57}}{\text{Rp. 59.433.923.000,00}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian = 1,032009645 atau X = 103,20%

Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

2. Analisis Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp.61.336.381.783,57}}{\text{Rp. 43.004.050.277,96}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas = 1,426293137 atau X = 142,62%

Efektifitas Daerah	Rasio Efektifitas (%)
Tidak Efektif	X < 100%
Efektifitas berimbang	X = 100%
Efektif	X > 100%

3. Analisis Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 21.392.942.080,00}}{\text{Rp. 61.336.381.783,57}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi = 0,348780633 atau X = 34,87%

**Lampiran 4: Analisis Rasio Kemandirian, efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2014**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2014		Selisih	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	64.135.857.344,4	80.934.314.478,9	16.798.457.134,49	126,19 %
2.	Pendapatan Transfer (DAK)	67.785.290.000,0	50.838.968.000,0	16.946.322.000,00	
3.	Biaya-biaya	22.442.952.146,0	19.198.916.440,0	3.244.035.706,0	75,00%
		0	0	0	85,55%
	Jumlah/ Rata-rata	131.921.147.244,46	131.773.282.478,95	33.744.779.134,49	201,19 %

1. Analisis Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provisi dan Pinjamana}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Rp. 80.934.314.478,95}}{\text{Rp. 67.785.290.000,00}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian = 1,1939805 atau X = 119,39

Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

2. Analisis Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 80.934.314.478,95}}{\text{Rp. 64.135.857.344,46}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas = 1,261919897 atau X = 126,19%

Efektifitas Daerah	Rasio Efektifitas (%)
Tidak Efektif	$X < 100\%$
Efektifitas berimbang	$X = 100\%$
Efektif	$X > 100\%$

3. Analisis Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 19.198.916.440,00}}{\text{Rp. 80.934.314.478,95}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 0,237216026 \text{ atau } X = 23,72\%$$